

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemberantasan kemiskinan termasuk agenda pertama dari 17 agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi *concern* utama pemerintah Indonesia sampai sekarang ini. Permasalahan kemiskinan ini dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan (Ferezagia, 2018, hlm.2). Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berbunyi “kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”. Keutuhan yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial politik.

Menurut BPS (2020) Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Selama periode 2016-2020 Garis Kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2016 Rp. 350.420 menjadi Rp. 433.281 di tahun 2020 (bps.go.id update 2020).

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ditempuh melalui beberapa strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab akibat terjadinya suatu kejadian. Badan Pusat Statistik Nasional (bps.go.id) menjelaskan:

1. Pada bulan Maret 2019 penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) mencapai 25.144.72 juta orang (9,41%) di Indonesia.
2. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7.02 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 13.20 persen.
3. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Garis Kemiskinan Makanan pada Maret 2019 tercatat sebesar 313,23 juta orang sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan tercatat sebesar 112,0 juta orang.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 terkait dengan Kemiskinan menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2019 berjumlah 3.399.16 juta orang (6,91%). Lebih sedikit dibandingkan dengan Maret 2018 berjumlah 3.615.79 juta orang (7,45%). Garis Kemiskinan (GK) bulan Maret 2019 sebesar Rp. 376.86 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan pada bulan Maret 2018 yaitu sebesar 364.15 per kapita per bulan. Berdasarkan data tersebut, kita ketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari tahun 2018 ke 2019 sedangkan garis kemiskinannya meningkat dari tahun 2018 ke 2019.

Tabel 1. 1. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Menurut Daerah September 2018-Maret 2019

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Perkotaan					
September 2018	266.339	105.920	372,259	2.336.32	6.33
Maret 2019	280.844	108.134	388,978	2.268.75	6.03
Perdesaan					
September 2018	266.339	91.144.	357,483	1.203.08	10.07
Maret 2019	280.844	92.689	373,533	1. 130.41	9.79
Perkotaan+ Desa					
September 2018	266.064	102.311	368,375	3.539.40	7.25
Maret 2019	281.693	104.505	386,198	3.399.16	6.91

Sumber: BPS Update 2019

Data BPS di atas menggambarkan persentase penduduk miskin di Jawa Barat berdasarkan daerah tempat tinggal masyarakat (pedesaan atau perkotaan). Disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Barat yang tinggal di daerah perkotaan menurun dari tahun 2018 ke 2019 begitupun yang berada di pedesaan serta akumulasi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan.

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat sudah menginjak usia 13 tahun setelah pemekaran tahun 2007. Daerah ini masih berkembang dan sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang sedang berkembang tentunya selain infrastruktur dan indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi juga masih menjadi masalah utama termasuk kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ini (mediaindonesia.com, 2015). Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat mencapai 159 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp.309.304

dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 169 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 329.415 (Update BPS Kab. Bandung Barat, 2018).

Desa Cihampelas merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan data dari profil desa Cihampelas jumlah keluarga miskin yaitu 2.867 keluarga. Data kemiskinan pada tiap-tiap kampung di Cihampelas dapat dilihat secara singkat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2. Data Keluarga Miskin Desa Cihampelas

No	RW	Kampung	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Data Keluarga Miskin	Persentase (%)
				L	P	Jml		
1	I	Cihampelas	1.296	842	822	1664	617	48%
2	II			1440	1397	2837		
3	III	Babakan	1.349	1158	1129	2287	795	59%
4	IV	Ciajur		1183	1134	2317		
5	V	Palayangan	365	952	768	1720	108	29%
6	VI	Rongga	1.013	594	605	1199	359	35%
7	VII			433	422	855		
8	VIII	Salakopi	973	608	619	1227	699	69%
9	IX			310	284	595		
10	X			704	621	1325		
11	XI	Lembur sawah	304	469	448	917	101	33%
12	XII	Cipanji	350	491	322	813	142	40%
13	XIII	Campelas	153	275	263	538	46	0%
Jml	13	8	5436	9459	8834	18294	2867	-

Sumber: Profil Desa Cihampelas Kab. Bandung Barat, 2018

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kampung Babakan Cianjur termasuk salah satu kampung yang memiliki keluarga miskin terbanyak di Desa Cihampelas yaitu sejumlah 795 (59%) keluarga miskin tinggal di kampung tersebut. Kondisi ekonomi menyebabkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan lainnya.

Kemiskinan biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Soetomo (2012) *Syndrome* kemiskinan mempunyai dimensi-dimensi yang saling berkaitan yaitu produktivitas rendah, pengangguran, kurang gizi, buta huruf, dan sebagainya. Keluarga

yang sudah masuk dalam lingkaran kemiskinan akan jauh dari kondisi sejahtera. Kemiskinan memaksa keluarga terjebak dalam kondisi kesehatan yang buruk, tidak mampu mengakses pendidikan, produktivitas keluarga menurun akibat terjerat kemiskinan. Rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun sehingga berdampak terhadap menurunnya produktivitas keluarga. Keluarga miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak berdaya untuk keluar dari kemiskinan sehingga membutuhkan intervensi dari pihak luar untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satu yang menjadi solusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga adalah koperasi. Sebagaimana dalam pasal 1 UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota atau badan hukum koperasi dimana seluruh kegiatannya berlandaskan kepada prinsip gotong royong dan rasa kebersamaan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mubyarto (2003, hlm.10) mengungkapkan bahwa pembangunan koperasi identik dengan pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2009, berdirilah sebuah koperasi sebagai wadah dalam membina masyarakat miskin yang bernama Koperasi Bangkit Bersama. Koperasi ini memiliki anggota yang pada umumnya bekerja sebagai pemulung dan masyarakat miskin yang bermukim disekitar waduk Saguling sungai Citarum. Koperasi ini didirikan berawal dari keprihatinan beberapa orang tokoh masyarakat terhadap kerusakan lingkungan waduk Sangguling sungai Citarum yang diakibatkan oleh timbunan sampah dan eceng gondok serta semakin dangkalnya waduk Saguling karena sedimentasi (masuknya lumpur). Selain itu, juga dipicu oleh lemahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar waduk Saguling. Oleh sebab itu lahirlah sebuah gagasan untuk membangun simbiosis mutualisme antara pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk dengan upaya pelestarian lingkungan waduk Sangguling sungai Citarum.

Koperasi Bangkit Bersama merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang memiliki visi “menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang terbuka dan transparan yang

mampu meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat secara luas dengan tetap berpijak pada pelestarian lingkungan”. Koperasi melakukan upaya pemberdayaan dalam membangkitkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berperilaku arif terhadap lingkungan. Berdasarkan pendapat Ife (1995) dalam Oos (2014, hlm 49) bahwa pemberdayaan merupakan upaya menyiapkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depannya dan berpartisipasi untuk mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Upaya ini dilakukan koperasi dengan membekali masyarakat pengetahuan bagaimana cara mengelola sampah mulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi dari ketua RT kampung Babakan Cianjur bahwa saat ini jarang sekali masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Lingkungan rumah dan lingkungan sekitar terlihat bersih dari sampah.

Koperasi juga melakukan upaya pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kualitas diri dan keluarga melalui pelatihan. Menurut pendapat Marwanti (2014, hal.170) bahwa masyarakat miskin dapat dikembangkan kemampuannya dengan mendorong produktivitas melalui peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pengembangan *soft skill*-nya agar menjadi pendorong atau kekuatan diri meraih kemajuan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pendapat Lestari (2006) dan Fajar (2009) yang menyatakan bahwa pelatihan mampu meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penelitian Siti Nur Aini (2018) dengan judul “Pelatihan Keterampilan Daur Ulang Sampah Plastik Sebagai Upaya Memberdayakan Ibu-Ibu Desa” dengan hasil penelitian yaitu: a) pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat tas dari daur ulang sampah plastik dengan tidak membagi atau mengelompokkan peserta pelatihan menjadi kelompok-kelompok kecil namun pelatihan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kelompok besar; b) hasil pelatihan keterampilan ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup; c) faktor yang mendukung pelaksanaan pelatihan ini adalah antusias peserta pelatihan dan bahan yang mudah didapat; d) faktor

penghambat adalah kurangnya fasilitas mesin jahit dan kurangnya tutor; e) dampak pelatihan ini yaitu adanya pembentukan usaha kelompok, peningkatan pendapatan ekonomi, dan partisipasi sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rakib (2016) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pelatihan Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di desa Lero” dengan hasil penelitian yaitu: a) pelaksanaan program pelatihan pembuatan ikan asin melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan yang terbukti efektif, b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pelatihan berbasis potensi lokal desa, c) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memproduksi ikan asin, d) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan swadana dan swadaya dalam mengembangkan kelompok usaha kecil/rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Zeth Patty (2019) dengan judul “Pelatihan Pembibitan Tanaman Hutan bagi Kelompok Pemuda di Desa Daru” dengan hasil penelitian bahwa pelatihan dilaksanakan melalui penyuluhan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok pemuda. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa adanya pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok pemuda sehingga terdorong untuk melakukan penanaman kembali areal hutan.

Hasil penelitian Sutikno (2010) dengan judul pemilihan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan pelatihan dengan pendekatan sistem” menunjukkan bahwa perencanaan program pelatihannya dilakukan melalui SWOT, pembentukan kelompok perwakilan desa (KPD), melakukan konfirmasi dan rencana implementasi program bersama KPD, berdasarkan hasil analisis SWOT, program yang terpilih untuk mengentaskan kemiskinan yaitu pelatihan dan pendampingan wirausaha, pendirian koperasi simpan pinjam, pengadaan air bersih untuk Rumah Tangga Miskin, pengembangan desa dengan pendayagunaan air bersih, dan penanganan sampah rumah tangga.

Hasil penelitian Ateng Wesa (2014) dengan judul “Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Peserta Pelatihan Kelompok Koperasi” menunjukkan bahwa kelompok koperasi dibentuk dari organisasi kelompok masyarakat umum yang memiliki pola pikir

yang sama dengan bantuan Dinas Koperasi melalui sosialisasi terkait proses pembentukan kelompok dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Biaya pelatihan disediakan oleh pemerintah daerah masih kurang sehingga waktu pelatihan terbatas. Pelatihan yang dilaksanakan disambut baik oleh peserta dari kelompok koperasi karena materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan dilapangan dalam mengelola usaha atau membuka usaha baru. Pelaksanaan pelatihan didukung oleh biaya dari pemerintah daerah, memiliki fasilitator pelatihan yang memadai dan didukung oleh peserta pelatihan yang memiliki motivasi untuk belajar agar dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi maupun usaha sendiri. Kontribusi pelatihan yaitu dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan Koperasi Bangkit Bersama berbeda dengan pelaksanaan pelatihan pada umumnya. Perbedaannya terlihat pada penerimaan peserta pelatihan yaitu dengan menerapkan pendekatan *family cluster*. Koperasi melakukan pengelolaan dan pengorganisasian individu peserta pelatihan dengan mengelompokkan berdasarkan garis kekeluargaan atau kekerabatan masing-masing masyarakat. Upaya penyebarluasan inovasi atau pembaharuan kepada masyarakat membutuhkan berbagai macam pendekatan agar menarik minat dan perhatian serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Effendy (2007, hlm. 49) pendekatan adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. *Family cluster* adalah pendekatan yang dikembangkan oleh pengelola dalam menyelenggarakan pelatihan terhadap masyarakat. Pengelola Koperasi memaknai bahwa *family cluster* ini merupakan sebuah pendekatan dalam melaksanakan pelatihan secara berkelompok, dalam hal ini kelompok keluarga yang dibentuk berdasarkan ikatan dan rasa kekeluargaan. Menurut penuturan bapak Indra sebagai pengurus koperasi bahwa pendekatan ini dapat memudahkan pengelola dalam menggerakkan, membina, membimbing, serta mengevaluasi proses pelatihan yang dijalankan. Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pelatihan Keterampilan Berbasis *Family Cluster* di Koperasi Bangkit Bersama".

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Keluarga miskin yang tinggal di kampung Babakan Cianjur berjumlah 795 (59%) keluarga yang kurang memiliki kemampuan dan kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan
- b. Upaya pemberdayaan yang dilakukan koperasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku arif terhadap lingkungan
- c. Pelatihan yang dilaksanakan koperasi menggunakan pendekatan *family cluster* dengan sistem perekrutan yang berbeda yaitu berdasarkan garis kekeluargaan mampu menarik minat peserta pelatihan

Rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah pelatihan keterampilan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama?”. Sedangkan rumusan masalah secara khusus sebagai berikut.

1. Bagaimanakah input pelatihan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama?
2. Bagaimanakah proses pelatihan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama?
3. Bagaimanakah dampak/*outcome* pelatihan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini

1. Mengidentifikasi input pelatihan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama
2. Mendeskripsikan proses pelatihan keterampilan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama
3. Untuk menganalisis dampak/*outcome* pelatihan berbasis *family cluster* di Koperasi Bangkit Bersama

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmiah mengenai konstruk teori terkait pendekatan pelatihan berbasis *family cluster* serta memperkaya khasanah ilmu dalam bidang Pendidikan Masyarakat khususnya program pelatihan.
- b. Mengaplikasikan teori dan konsep terkait pendekatan pelatihan berbasis *family cluster* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Kajian ini sebagai analisis pengkajian pendekatan pelatihan berbasis *family cluster* sehingga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan program pelatihan keterampilan dalam pengembangan SDM yang berkualitas.

b. Bagi Pengelola Koperasi Bangkit Bersama

Kajian ini memberikan gambaran dan umpan balik yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program pelatihan ke depannya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara optimal.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat mengkajinya dengan perbedaan pendekatan, instrumen dan lebih komprehensif dalam penelitian yang dilakukan.

1.5. Struktur Organisasi Tesis

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian. Penulis membagi pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan bersisikan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis

BAB II Kajian Pustaka merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian atau teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian yaitu terdiri dari konsep pelatihan dan konsep pendekatan *family cluster*

BAB III Metode Penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan merupakan pemaparan hasil temuan dan kondisi empirik yang didapat oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Pada pemaparan pembahasan, peneliti akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab I.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi merupakan simpulan hasil temuan dan pembahasan yang akan dikorelasikan dengan kajian pustaka yang relevan sehingga adanya kesinambungan antara kajian empirik dengan kajian teori. Selain itu juga peneliti memaparkan rekomendasi atau saran baik kepada lembaga terkait maupun peneliti selanjutnya terhadap hasil penelitian.